

## DIALEKTIKA NEGARA DAN KETERGANTUNGAN: ANALISIS EKONOMI POLITIK PADA KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI INDONESIA

### *STATE AND DEPENDENCY DIALECTICS: A POLITICAL ECONOMY ANALYSIS OF THE POLICY ON INCREASING THE USE OF DOMESTIC PRODUCTS IN INDONESIA*

**Priyo Arief Wicaksono<sup>1</sup>**

Universitas Brawijaya<sup>1</sup>

email:

[leepaw44@gmail.com](mailto:leepaw44@gmail.com)

**Ike Wanusmawatie<sup>2</sup>**

Universitas Brawijaya<sup>2</sup>

email: [ikew@ub.ac.id](mailto:ikew@ub.ac.id)

**Abstrak:** Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan pilar strategis Indonesia untuk memperkuat industri lokal di tengah persaingan global. Namun, implementasinya melibatkan dinamika kompleks antara agensi negara dan tekanan struktural ekonomi global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan P3DN dari perspektif ekonomi politik pembangunan, dengan menggunakan *state-centered approach* dan Teori Ketergantungan sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis literatur akademis yang relevan dan laporan institusional. Hasil analisis menunjukkan adanya sebuah dialektika fundamental. Dari perspektif *state-centered*, P3DN adalah manifestasi otonomi negara untuk melindungi industri baru (*infant industry*) dan membangun kapasitas nasional. Namun, dari lensa Teori Ketergantungan, kebijakan ini dilihat sebagai bentuk neo-Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang berisiko menciptakan ketergantungan baru pada teknologi dan modal asing. Validitas kekhawatiran ini diperkuat oleh temuan literatur yang menunjukkan bahwa implementasi P3DN masih terhambat oleh tantangan internal (kapasitas industri dan SDM) dan tekanan eksternal (aturan perdagangan global). Disimpulkan bahwa keberhasilan P3DN tidak dapat diukur semata dari pemenuhan target kuantitatif, tetapi dari terbangunnya kapabilitas inovasi domestik yang substantif. Oleh karena itu, strategi P3DN direkomendasikan untuk bergeser dari sekadar pemenuhan formalitas menuju penguatan ekosistem teknologi secara fundamental untuk menghindari jebakan ketergantungan baru.

**Kata Kunci:** P3DN; Ekonomi Politik Pembangunan; *State-Centered Approach*; Teori Ketergantungan.

**Abstract:** The Policy for Increasing the Use of Domestic Products (P3DN) is a strategic pillar for Indonesia to strengthen local industries amidst global competition. However, its implementation involves a complex dynamic between state agency and global economic structural pressures. This article aims to analyze the P3DN policy from a political economy of development perspective, using the *state-centered approach* and *Dependency Theory* as its analytical framework. The study employs a *Systematic Literature Review* (SLR) to synthesize relevant academic literature and institutional reports. The analysis reveals a fundamental dialectic. From a *state-centered* perspective, P3DN is a manifestation of state autonomy to protect infant industries and build national capacity. Through the lens of *Dependency Theory*, however, the policy is viewed as a form of neo-Import Substitution Industrialization (neo-ISI) that risks creating new dependencies on foreign technology and capital. The validity of this concern is reinforced by literature findings showing that P3DN's implementation is still hindered by internal challenges (such as industrial capacity and human resources) and external pressures (such as global trade rules). It is concluded that the success of P3DN cannot be measured solely by the fulfillment of quantitative targets, but by the development of substantive domestic innovation capabilities. Therefore, it is recommended that the P3DN strategy shifts from merely fulfilling formalities to fundamentally strengthening the technology ecosystem in order to avoid the trap of new dependencies.

**Keywords:** P3DN; Political Economy of Development; *State-Centered Approach*; *Dependency Theory*.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 5, No. 3, pp. 207-220

Juli 2025



Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

## PENDAHULUAN

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu pilar strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat industri dalam konteks persaingan global. Dalam hal ini, negara

memiliki peranan penting melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal yang memungkinkan industri domestik berkembang dan beradaptasi terhadap permintaan pasar dan tantangan global (Dabukke & Iqbal, 2016; Indrasari et al. 2024). Sebagai referensi, pengalaman negara-negara seperti Thailand, India, dan Jepang

dapat memberikan gambaran kebijakan pemerintah yang memberi perhatian serius dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan pertanian yang mampu melindungi pasar domestik (Dabukke & Iqbal, 2016).

P3DN juga berkaitan erat dengan kebijakan investasi, baik dari modal asing maupun dalam negeri. Kebijakan yang mendorong investasi dalam sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar perekonomian nasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Azizah et al., 2024; Ibrahim, 2022; Abib et al., 2017). Meningkatnya ketersediaan modal dan kemampuan teknis yang memadai memungkinkan industri domestik berkompetisi di pasar global dan menciptakan lapangan kerja (Abib et al., 2017).

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam sebuah industri dapat berfungsi tidak hanya sebagai penyedia keamanan tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (Pedah et al., 2025; Fride & Achraf, 2024). Dalam hal ini, kebijakan proaktif pemerintah dalam memberikan insentif bagi industri dapat mempercepat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dan produk asing (Fride & Achraf, 2024).

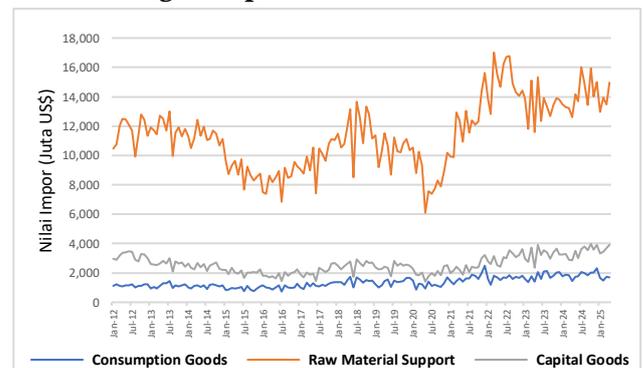
Kebijakan pemerintah dalam melindungi produk dalam negeri dilakukan melalui landasan hukum formal. Landasan hukum yang menopang kebijakan P3DN cukup beragam, mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (diubah sebagian melalui PP Nomor 28 Tahun 2021 jo. PP Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian), serta Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46 Tahun 2025 hingga turunan-turunannya.

Beberapa aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu. Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan target-target spesifik, seperti peningkatan rata-rata nilai TKDN dari 43,3% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2024, dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah minimal Rp 400 triliun pada tahun 2022 untuk produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Aturan-aturan P3DN di atas memang tidak serta merta menekan pertumbuhan impor Indonesia. Jika dilihat pada grafik 1, impor Indonesia sejak Tahun 2012 sempat mengalami beberapa penurunan, beberapa diantaranya yakni tahun 2015 dan 2020. Sedangkan setelah tahun 2020 hingga 2022 impor Indonesia kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada produk impor masih mengalami tren positif meskipun adanya beberapa intervensi pemerintah.

**Gambar 1.**

**Perkembangan Impor Indonesia Tahun 2012-2024**



Sumber: Kemendag (2025), diolah.

Kebijakan P3DN tidak dapat dipahami secara terisolasi dari konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Kebijakan ini adalah produk dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dan kepentingan, serta dipengaruhi oleh struktur kekuasaan baik di tingkat domestik maupun global. Oleh karena itu, analisis kebijakan P3DN menuntut penggunaan kerangka ekonomi politik pembangunan yang mampu membongkar

dinamika tersebut. Dalam konteks ini, dua pendekatan teoritis utama akan digunakan sebagai pisau analisis: *state-centered approach* dan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*).

*State-centered approach* menekankan peran sentral negara sebagai aktor otonom yang memiliki kapasitas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi, terlepas dari tekanan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat (Oatley, 2011; Evans et al., 1985). Perspektif ini menyoroti pentingnya otonomi relatif negara dan kapasitas birokrasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional (Evans et al., 1985).

Di sisi lain, Teori Ketergantungan yang dipelopori Raul Prebisch, yang juga dikembangkan oleh Theotonio Dos Santos, memberikan lensa kritis untuk memahami bagaimana struktur ekonomi global dan relasi historis antara negara-negara pusat (maju) dan negara-negara pinggiran (berkembang) dapat menciptakan dan melanggengkan kondisi ketergantungan (Dos Santos, 1970). Teori ketergantungan muncul sebagai kritik atas teori modernisasi sebagai situasi di mana ekonomi suatu negara dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi negara lain, yang dapat menghambat pembangunan otonom di negara pinggiran (Dos Santos, 1970). Para penganjur teori ini menekankan bahwa negara-negara pinggiran perlu "melepaskan diri" (*delinking*) dari hubungan ketergantungan ini (Edet & Adie, 2024). Strategi yang diusulkan termasuk memperkuat sistem ekonomi domestik dan kebijakan substitusi impor untuk meningkatkan produksi dan permintaan dalam negeri.

Penerapan kebijakan P3DN sejatinya merupakan manifestasi kontemporer dari strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang secara historis telah banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang (Munson & Rosenblatt, 1997; Jackson & Jabbie, 2020). Tujuan P3DN untuk menggantikan produk

impor dengan produk domestik sejalan dengan esensi ISI. Teori ketergantungan seringkali digunakan untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan implementasi ISI di berbagai negara, menyoroti bagaimana upaya melepaskan diri dari ketergantungan eksternal seringkali dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks (Lyne, 2015; Grinberg, 2022; Zafarullah & Huque, 2021). Untuk contoh konkret, kebijakan ini diadopsi sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang mendorong negara-negara seperti Brasil, Argentina, dan Meksiko untuk menciptakan industri domestik guna mencapai kemakmuran ekonomi (Moudud & Botchway, 2007; Brambilla et al., 2018)

Dengan demikian, P3DN dapat dipandang sebagai bentuk neo-ISI yang juga relevan untuk dianalisis melalui kerangka teori ketergantungan, guna memahami apakah kebijakan ini benar-benar mengarah pada kemandirian atau justru menciptakan bentuk-bentuk ketergantungan baru (Kabonga, 2017). Pemilihan *state-centered approach* bersama dengan Teori Ketergantungan sebagai landasan analisis juga menyiratkan pengakuan awal bahwa kebijakan P3DN melibatkan dialektika antara agensi negara – yakni kemampuan negara untuk merancang dan mendorong kebijakan – dengan batasan-batasan struktural yang inheren dalam posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global. *State-centered approach* akan membantu mengeksplorasi sejauh mana negara memiliki otonomi dan kapasitas untuk bertindak (Oatley, 2011; Evans et al., 1985), sementara teori Ketergantungan akan menyoroti bagaimana struktur ekonomi dunia dapat membatasi atau membentuk pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia bagi negara (Dos Santos, 1970).

Berangkat dari kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan P3DN di Indonesia. Dengan menggunakan *state-centered approach* dan teori ketergantungan sebagai pisau analisis,

penelitian ini akan membongkar dialektika antara otonomi negara dalam mendorong industrialisasi dan batasan struktural ekonomi global yang berisiko menciptakan ketergantungan baru. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan dan prospek kebijakan P3DN dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

## METODE ANALISIS

Untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, metode *Systematic Literature Review* (SLR) dipilih sebagai pendekatan utama. Penggunaan SLR dilakukan untuk melakukan tinjauan yang komprehensif, transparan, sistematis, dan dapat direplikasi terhadap literatur akademis yang relevan dengan kebijakan P3DN, ekonomi politik pembangunan, *state-centered approach*, dan teori ketergantungan. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi secara kritis, dan mensintesis penelitian berkualitas tinggi yang relevan dengan topik yang dikaji, sehingga menghasilkan landasan bukti yang kuat untuk analisis. Dengan melakukan SLR, penelitian ini tidak hanya bergantung pada materi awal yang tersedia, tetapi secara proaktif mencari dan mensintesis basis pengetahuan yang lebih luas, yang pada gilirannya akan meningkatkan validitas dan kedalaman analisis.

Prosedur SLR yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan standar. Tahap Perencanaan dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian SLR yang spesifik: "Bagaimana literatur akademis terkini membahas implementasi kebijakan P3DN dan kebijakan sejenis yang berfokus pada *Local Content Requirement* (LCR) di negara berkembang, serta bagaimana *state-centered approach* dan teori ketergantungan diterapkan untuk menganalisis kebijakan tersebut". Selanjutnya, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk seleksi artikel. Kriteria inklusi

meliputi: artikel jurnal yang telah melalui proses *peer-review*, bab buku, dan laporan penelitian, *proceeding* dari institusi bereputasi; publikasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; fokus pada kebijakan P3DN, TKDN, *local content requirement*; serta studi kasus di Indonesia atau negara berkembang lain dengan konteks kebijakan yang serupa. Kriteria eksklusi meliputi: artikel non-akademis seperti opini atau berita di media massa, serta penelitian yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kerangka teori yang digunakan atau fokus kebijakan P3DN.

Tahap Pelaksanaan melibatkan strategi pencarian literatur yang komprehensif. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: "Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri", "Tingkat Kandungan Dalam Negeri", dan "*Local Content Requirement*". Sumber data atau basis data akademik utama yang dijelajahi melalui bantuan aplikasi *Publish or Perish* yang mengambil dari database mencakup *Scopus*, *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, dan *Crossref* serta aplikasi Elicit.

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, diikuti dengan peninjauan teks lengkap untuk artikel-artikel yang lolos seleksi awal. Proses ini dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa hanya artikel yang benar-benar memenuhi kriteria inklusi yang disertakan dalam analisis.

Tahap analisis dan sintesis merupakan tahap akhir dari SLR. Pada tahap ini, dilakukan ekstraksi data dari setiap artikel yang terpilih. Informasi kunci yang diekstraksi meliputi argumen utama penulis, metodologi penelitian yang digunakan, temuan-temuan signifikan, dan relevansi temuan tersebut dengan analisis kebijakan P3DN melalui kerangka *state-centered approach* dan teori ketergantungan dari literatur terkait. Setelah data terkumpul, dilakukan sintesis kualitatif. Sintesis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam temuan-temuan dari literatur yang dikumpulkan guna

mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, pola-pola argumen, potensi kesenjangan dalam penelitian yang ada, serta bagaimana berbagai studi tersebut secara kolektif berkontribusi pada pemahaman yang lebih kaya mengenai kebijakan P3DN dan implikasinya. Diharapkan melalui proses SLR ini akan terungkap bahwa meskipun terdapat banyak studi mengenai kebijakan P3DN/TKDN/LCR secara umum, analisis yang spesifik di Indonesia melalui kombinasi unik *state-centered approach* dan teori ketergantungan yang masih terbatas. Jika demikian, artikel ini berpotensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi kebaruan bagi literatur yang ada.

**HASIL**

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap untuk memastikan relevansi dan kualitas. Dari total 46 artikel yang teridentifikasi pada pencarian awal, dilakukan penyaringan sebagai berikut: Tahap 1 dilakukan penyaringan judul dan abstrak. Sebanyak 21 artikel dieksklusi karena tidak relevan secara langsung dengan fokus kebijakan P3DN/TKDN/LCR. Tahap 2 evaluasi teks lengkap, dimana dari 25 artikel yang tersisa, sebanyak 11 artikel kemudian dieksklusi karena tidak memiliki keterkaitan dengan kerangka teori yang digunakan atau pembahasannya terlalu teknis, pembahasan terlalu menyangkut aspek internal, atau analisis kebijakan yang kurang mendalam. Melalui proses penyaringan sistematis ini, diperoleh sejumlah 14 artikel yang dinilai paling relevan dan memenuhi seluruh kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut sebagaimana tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Ekstraksi Kajian Penelitian Terdahulu**  
**Mengenai P3DN**

Penulis, Tahun, Judul	Temuan utama
Purwanto, et. al., (2021). Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk	Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang berujung pada krisis global dan meningkatnya pengangguran. -

Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri	Produk dalam negeri dapat menjadi urat nadi bagi usaha mikro dan kecil dengan mengalihkan fokus dari ekspor ke impor produk kesehatan penting. Penerapan <i>e-procurement</i> dan layanan pemerintah digital dapat memberikan peluang bagi produk dalam negeri dan usaha kecil.
Sitompul, et. al., (2021). Tantangan Kebijakan Persyaratan Kandungan Lokal Indonesia pada Kemampuan Produksi Pembangkit dan Turbin Listrik.	Penelitian ini mengkaji kemampuan industri turbin nasional dan lembaga penelitian di Indonesia. Tiga tantangan utama yang diidentifikasi: kemampuan dan upaya teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan alokasi anggaran untuk pembuatan prototipe, penyederhanaan perizinan teknologi, dan pengembangan industri pendukung.
Firdaus, et. al., (2021). Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik	Kebijakan P3DN yang direalisasikan melalui sertifikasi TKDN mampu mendorong daya saing produk lokal didukung data produksi keramik yang meningkat dari tahun 2020 sampai 2022 baik secara total output maupun total penjualan. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden no.16 tahun 2018.
Isnaeniah, et. al., (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum, penggunaan produk dalam negeri perlu ditingkatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri terhambat oleh kesenjangan dalam implementasi dan komitmen dari kementerian dan pemerintah daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral/ Lokal masih sangat minim, dimana belum banyak produk yang masuk ke dalam katalog; masih banyak Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum mengisi perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai yang diamanatkan; serta belum sinkronnya peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri dengan aturan TKDN.
Hardenta, et. al. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional.	Kebijakan proteksionisme di Indonesia mendorong adanya kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga menjadi faktor penentu dalam seleksi internasional. - Kebijakan TKDN memberikan peluang bagi produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi membatasi keikutsertaan asing

<p>Puspitawati, (2023). Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO).</p>	<p>dalam proses seleksi internasional. Dalam praktiknya, terdapat konflik dengan kewajiban TKDN, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi yang efektif. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia bertujuan untuk memberdayakan produk nasional dengan menjamin terpenuhinya persentase kandungan lokal tertentu guna melindungi industri dalam negeri dari produk impor. TKDN merupakan ketentuan yang mensyaratkan suatu produk dikatakan sebagai produk dalam negeri apabila produk tersebut sebagian besar diproduksi menggunakan bahan baku dalam negeri dibandingkan komponen impor. Penerapan TKDN pada industri farmasi dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha dalam negeri mengembangkan bahan baku farmasi dalam negeri.</p>	<p>Pertama di Indonesia untuk Mematuhi Kebijakan Persyaratan Kandungan Lokal.</p>	<p>dalam penerapan kebijakan Persyaratan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor energi terbarukan di Indonesia. Kombinasi antara pasokan dan permintaan tenaga surya fotovoltaik (PLTS) serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN, badan usaha swasta, dan pemilik teknologi sangat penting untuk mengembangkan usaha manufaktur panel surya fotovoltaik (PLTS) di dalam negeri yang memenuhi standar TKDN.</p>
<p>Kanaidi, (2023). Kajian Implementasi Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sebagai Aspek Penentu Peningkatan Pemenang Pengadaan Atau Tender Barang dan Jasa Pemerintah</p>	<p>Kajian ini menitikberatkan pada peran TKDN dalam memajukan usaha lokal dan daya saing dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kajian ini mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa, meliputi regulasi, kompetensi sumber daya manusia, perencanaan anggaran, organisasi, dan proses audit. Masih kurangnya pemahaman tentang TKDN di kalangan penyedia dan pelaku pengadaan, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik.</p>	<p>Irawan, (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan dalam penggunaan produk dalam negeri yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terdapat tantangan yang timbul dalam pemenuhan ketentuan dalam regulasi TKDN yang seringkali menjadi hambatan bagi investor asing. Sebagai contoh, ketidakpastian mengenai kriteria yang harus dipenuhi dan kompleksitas administratif dapat memunculkan keraguan investor asing dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Ketentuan TKDN akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi oleh investor asing dan mempengaruhi kelancaran program seperti proyek Pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar ketentuan TKDN di Indonesia dievaluasi, serta disesuaikan melalui relaksasi bagi komponen-komponen yang saat ini memang dibutuhkan segera di Indonesia namun belum dapat dipenuhi secara domestik, setidaknya sampai dengan industri domestik telah siap untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.</p>
<p>Nurhayati, (2023). <i>The Obligation of Local Content Requirements (LCR) of Power Plant from the Perspective of the World Trade Organization (WTO)</i></p>	<p>Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan TKDN Indonesia di bidang pembangkit listrik selaras dengan kebijakan WTO. Kebijakan TKDN Indonesia berpotensi bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya prinsip "National Treatment". Apabila dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan TKDN berpotensi terhindar dari pelanggaran WTO.</p>	<p>Marzuki &amp; Situmorang (2024). Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler</p>	<p>Ketentuan TKDN dalam skema perhitungan berbasis inovasi memberikan keleluasaan bagi perusahaan, namun menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya penggunaan komponen lokal. Skema tersebut bertentangan dengan semangat UU No. 3 Tahun 2014 yang mengamankan penggunaan produk dalam negeri. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri.</p>
<p>Mutaqin, (2024). Strategi dan Capaian Indonesia dalam Memberdayakan Konten Lokal di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengadaan</p>	<p>Program TKDN merupakan strategi untuk memajukan industri dalam negeri dengan mengedepankan konten lokal. Meski belum mencapai industrialisasi seperti Korea, kebijakan TKDN telah terhindar dari kegagalan pasar, tidak seperti Brasil. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan program penguatan industri lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.</p>		
<p>Imaduddin, (2024). Strategi Produsen PLTS Terintegrasi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki inisiatif-inisiatif guna mengatasi berbagai tantangan</p>		

Hidayat, et. al., (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan.	Tantangan utama dalam penerapan TKDN antara lain terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri, kualitas produk dalam negeri, serta pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan TKDN. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan TKDN menghadapi berbagai kendala. Rekomendasi yang diberikan antara lain peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif, serta koordinasi pemerintah-industri yang lebih baik.
Suryani, et. al. (2025). E-Purchasing: Langkah Nyata Pemerintah Dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	<i>E-purchasing</i> dan e-katalog memperluas akses pasar bagi produsen lokal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Hal ini meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui <i>e-purchasing</i> merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional, menggerakkan kembali roda perekonomian pasca-pandemi COVID-19, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun efektif, implementasi <i>e-purchasing</i> untuk mendukung P3DN masih menghadapi beberapa tantangan, seperti komunikasi kebijakan yang belum merata ke semua daerah, kesiapan infrastruktur teknologi yang terbatas, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, ketergantungan pada sistem manual, dan risiko keamanan siber.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Dari temuan-temuan di atas, dapat ditarik benang merah yang mengarah pada kedua kerangka teori utama. Sebagian besar literatur secara implisit maupun eksplisit menyoroti peran aktif negara dalam melindungi dan memberdayakan industri domestik melalui kebijakan P3DN/TKDN. Temuan seperti upaya mendorong daya saing, melindungi industri dari impor, dan penggunaan instrumen pengadaan pemerintah sangat selaras dengan asumsi *state-centered approach*. Di sisi lain, berbagai tantangan yang diidentifikasi seperti keterbatasan kapasitas teknologi domestik, potensi konflik dengan aturan WTO, serta kekhawatiran munculnya ketergantungan baru pada inovasi dan investasi asing mencerminkan adanya batasan

struktural dan risiko ketergantungan yang menjadi fokus utama teori ketergantungan.

Untuk melengkapi analisis berbasis literatur akademis, penting untuk melihat bagaimana kebijakan P3DN direspons oleh aktor negara lain. Oleh karena itu, laporan dari *United States Trade Representative (USTR)* dianalisis sebagai studi kasus yang merepresentasikan pandangan dan tekanan eksternal dari negara mitra dagang utama, yang memberikan gambaran nyata mengenai tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia.

**Tabel 2.**  
**Ekstraksi Laporan USTR terhadap Kebijakan P3DN/TKDN di Indonesia**

Sektor yang dipermasalahkan	Kritik Utama terkait P3DN/TKDN
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indonesia memberlakukan sejumlah <i>local content requirement</i> untuk produk TIK tertentu agar dapat dijual di pasar Indonesia. Persyaratan spesifik meliputi Perangkat berkemampuan 4G-LTE harus mengandung 35% konten lokal, dan stasiun pangkalan (base station) 4G-LTE harus 40%; Peralatan untuk layanan broadband nirkabel tertentu harus memiliki konten lokal minimal 30% untuk stasiun pelanggan dan 40% untuk stasiun pangkalan; Peralatan nirkabel lainnya harus mengandung 50% konten lokal; seta TV dan set-top box tertentu harus mengandung setidaknya 20% konten lokal.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pemerintah Indonesia menanggukkan impor 79 kategori produk alat kesehatan dari e-Katalog pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Sementara itu pada pengadaan barang/jasa pertahanan, ada preferensi prioritas untuk material dan komponen domestik. Ketika pengadaan dilakukan dari pemasok pertahanan asing, ada persyaratan untuk <i>offset</i> penyeimbangan perdagangan, yang dapat mencakup penggabungan produksi dalam negeri atau transfer teknologi.
Pertambangan	Indonesia menerapkan kebijakan yang melarang ekspor bijih mentah tertentu, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga, untuk mendorong pemrosesan dan manufaktur di dalam negeri. Panel WTO menemukan bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak konsisten dengan kewajiban WTO-nya.
Jasa Keuangan	Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan BI No. 21/2019 menetapkan standar nasional untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia, yang disebut QRIS ( <i>Quick Response</i>

Code Indonesian Standard). Peraturan BI lainnya mewajibkan semua transaksi ritel domestik dengan kartu debit dan kredit untuk diproses melalui lembaga *switching* GPN yang berlokasi di Indonesia dan dilisensikan oleh BI. Kebijakan ini juga berlaku untuk kartu kredit pemerintah per Mei 2023, yang menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan pembayaran A.S. karena dapat membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik mereka.

Waralaba dan Ritel

Perusahaan ritel diwajibkan untuk memprioritaskan penggunaan barang dan jasa dalam negeri kecuali produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas dari pemberi waralaba.

Sumber: diloah dari USTR (2025)

## PEMBAHASAN

### Peran Negara dalam Melindungi Industri Lokal

Dalam ilmu ekonomi politik, terdapat perdebatan fundamental antara pendekatan yang berpusat pada masyarakat (*social-centered*) dan yang berpusat pada negara (*state-centered*) mengenai peran pemerintah. Pendekatan *social-centered* cenderung memandang intervensi pemerintah sebagai penghambat kemajuan ekonomi, sementara pendekatan *state-centered* berargumen bahwa negara dapat bertindak secara otonom dan dalam kondisi tertentu, intervensinya justru diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Juan & Wegner, 2019). Dalam pandangan ini, kebijakan tidak semata-mata cerminan dari pertarungan kelompok kepentingan, melainkan bisa menjadi realisasi dari tujuan strategis negara itu sendiri (Oatley, 2011).

Aplikasi utama dari pendekatan *state-centered* adalah dalam kebijakan proteksi industri, yang sering disebut sebagai argumen "industri bayi" (*infant industry*) (Collins, 1993). Logikanya adalah industri yang baru lahir secara alamiah tidak efisien dan memerlukan perlindungan sementara dari persaingan internasional. Perlindungan ini bertujuan agar industri domestik dapat mencapai dua hal krusial, yang pertama adalah skala ekonomi. Dengan pasar domestik yang terlindungi, misalnya melalui tarif, perusahaan dapat

meningkatkan volume produksi untuk menekan biaya per unit. Setelah skala ekonomi tercapai, proteksi dapat dicabut sehingga industri siap bersaing secara global.

Kedua adalah "*economic experience*", dimana proteksi memberikan waktu bagi perusahaan untuk menguasai keterampilan dan teknologi produksi yang efisien, sehingga mampu menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas (Oatley, 2011). Konsep ini berkembang lebih lanjut dalam Teori Perdagangan Strategis, yang menyoroti peran vital pemerintah dalam membantu perusahaan domestik bersaing di industri global berteknologi tinggi yang cenderung bersifat oligopoli (Farid & Luneto, 2023). Contoh nyata keberhasilan strategi ini adalah Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Chung Hee, yang secara aktif menggunakan insentif fiskal dan subsidi untuk mentransformasi industrinya menjadi pemain teknologi global yang berorientasi ekspor (Yoo, 2008; Farid & Luneto, 2023).

Meskipun demikian, pendekatan ini bukannya tanpa kritik. Para ekonom mengingatkan bahwa proteksionisme berisiko hanya menguntungkan segelintir industri, sehingga tidak serta-merta menyejahterakan masyarakat luas (Oatley, 2011), dan instrumen seperti tarif bisa jadi tidak efektif bagi negara berkembang yang tidak dapat memengaruhi harga internasional (Krugman & Obstfeld, 2003).

Kerangka teoretis mengenai peran aktif negara dalam melindungi dan mendorong industri domestik inilah yang menjadi landasan relevan untuk menganalisis kebijakan P3DN di Indonesia. Kebijakan P3DN dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari pendekatan *state-centered* yang bertujuan membangun kapasitas industri nasional secara strategis melalui intervensi pemerintah yang kuat.

### **P3DN sebagai Instrumen Negara untuk Pemberdayaan Industri Lokal**

Sesuai dengan asumsi dasar *state-centered approach*, kebijakan P3DN dirancang sebagai instrumen pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial (Collins, 1993). Hal ini sejalan dengan temuan dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa P3DN bertujuan memberdayakan produk nasional dan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor (Purwanto, et. al., 2021; Firdaus, et. al., 2021; Isnaeniah, et. al., 2022; Hardenta, et. al., 2023; Puspitawati, 2023; Kanaidi, 2023; Mutaqin, 2024; Suryani, et. al., 2025). Logikanya, industri yang kuat dan berdaya saing akan menghasilkan produk berkualitas yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu sendiri, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Melalui instrumen seperti P3DN, pemerintah memberikan perlindungan pasar agar perusahaan industri dalam negeri dapat mencapai skala ekonomi dan ekonomi pengalaman (*experience economies*). Dukungan ini terlihat jelas pada upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan bahan baku farmasi lokal, industri keramik, manufaktur panel surya, serta pemanfaatan *e-purchasing* dan e-katalog untuk memperluas akses pasar bagi produsen lokal dan UMKM dalam pengadaan pemerintah (Firdaus, et. al., 2021; Puspitawati, 2023; Imaduddin, 2024). Upaya-upaya ini secara langsung menciptakan ekosistem yang kondusif agar penggunaan produk-produk hasil industri lokal tersebut dapat meningkat secara signifikan.

Meskipun tujuan P3DN selaras dengan kerangka *state-centered approach*, tinjauan literatur juga menyoroiti berbagai tantangan dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara otonom oleh negara dengan kapasitas negara dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi meliputi pertama,

kesenjangan implementasi dan komitmen. Banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen penuh dalam melaksanakan kebijakan P3DN. Hal ini terlihat dari minimnya pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral/Lokal dan kegagalan dalam mengisi perencanaan pengadaan barang/jasa (Purwanto, et. al., 2021; Kanaidi, 2023).

Kesenjangan kedua adalah terkait kapasitas industri domestik. Tantangan signifikan datang dari terbatasnya kapasitas produksi dan kualitas produk dalam negeri. Selain itu, terdapat kendala dalam hal kemampuan teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan industri pendukung (Puspitawati, 2023; Sitompul, et. al., 2021).

Kesenjangan terakhir adalah sumber daya manusia dan pemahaman, dimana masih kurangnya pemahaman mengenai TKDN di kalangan penyedia dan pelaku pengadaan menjadi penghambat. Diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang lebih baik (Kanaidi, 2023; Hidayat, et. al., 2024; Suryani, et.al., 2025).

Dari sisi eksternal, kebijakan P3DN menghadapi tantangan dari aspek hukum, seperti potensi konflik dengan ketentuan *World Trade Organization (WTO)*, khususnya prinsip perlakuan nasional (*national treatment*). Laporan USTR 2025 juga menggarisbawahi kritik dari mitra dagang seperti Amerika Serikat terhadap kebijakan P3DN di berbagai sektor, termasuk TIK, pengadaan pemerintah, pertambangan, dan jasa keuangan (Puspitawati, 2023; Nurhayati, 2023; USTR, 2025).

Kebijakan P3DN juga dapat dilihat dari sisi peran pemerintah dalam membantu industri lokal yang dituntut bersaing dengan industri berteknologi tinggi yang umumnya bersifat oligopolistik, terutama di pasar global (Farid & Luneto, 2023). Upaya Indonesia untuk mendorong TKDN di sektor TIK (perangkat 4G-LTE), pembangkit listrik, dan

energi terbarukan mencerminkan upaya strategis ini (USTR, 2025).

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh laporan USTR, langkah proteksionis ini menciptakan hambatan perdagangan luar negeri dan membatasi keikutsertaan asing. Hal ini menempatkan Indonesia dalam dilema: di satu sisi, negara perlu melindungi dan mengembangkan industri strategisnya, tetapi di sisi lain, tindakan tersebut dapat memicu konflik perdagangan dan melanggar komitmen internasional yang mendukung perdagangan bebas.

### **Kebijakan P3DN sebagai Neo-Industrialisasi Substitusi Impor dalam Lensa Teori Ketergantungan**

Tujuan utama kebijakan P3DN sejalan dengan semangat ISI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa P3DN dirancang untuk memberdayakan dan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor, mendorong pelaku usaha mengembangkan bahan baku domestik yang menjadi urat nadi bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Upaya ini, terutama melalui instrumen modern seperti *e-procurement* dan *e-katalog*, dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar bagi produsen lokal dan menggerakkan roda perekonomian (Suryani, et. al., 2025). Ambisi ini merefleksikan tujuan negara-negara Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina pada pertengahan abad ke-20 yang menerapkan ISI untuk menciptakan industri domestik demi mencapai kemakmuran ekonomi (Moudud & Botchway, 2007; Brambilla et al., 2018).

Meskipun memiliki tujuan yang luhur, implementasi P3DN dihadapkan pada serangkaian tantangan yang mengingatkan pada penyebab kegagalan kebijakan ISI di masa lalu. Teori ketergantungan mengkritik ISI karena seringkali menghasilkan industri yang tidak efisien dan gagal menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, yang

pada akhirnya berujung pada stagnasi (Moseley, 2017, Grinberg, 2022). Tinjauan literatur P3DN menyoroti permasalahan serupa di Indonesia sebagaimana dibahas hasil literatur review seperti kurangnya kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, hambatan birokrasi dan kelembagaan, dan sumber daya manusia (Purwanto, et. al., 2021; Firdaus, et. al., 2021; Isnaeniah, et. al., 2022; Hardenta, et. al., 2023; Puspitawati, 2023; Kanaidi, 2023; Mutaqin, 2024; Irawan, 2024; Suryani, et. al., 2025).

Masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa, sama seperti ISI yang seringkali gagal karena ketidakstabilan politik dan intervensi negara yang tidak efektif, P3DN juga berisiko menjadi kebijakan yang tidak optimal jika tidak didukung oleh perbaikan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari regulasi, kompetensi SDM, hingga perencanaan.

Kritik paling tajam dari teori ketergantungan terhadap ISI adalah bahwa kebijakan tersebut seringkali hanya menggantikan satu bentuk ketergantungan (pada barang jadi impor) dengan bentuk ketergantungan baru yang lebih kompleks, yakni pada teknologi, modal, dan akses pasar dari negara maju. Fenomena ini juga terlihat dalam implementasi P3DN di Indonesia.

Pertama, kebijakan P3DN yang proteksionistis menciptakan konflik dengan tatanan perdagangan global. Laporan USTR secara eksplisit mengkritik kebijakan P3DN/TKDN di berbagai sektor—mulai dari TIK, alat kesehatan, pertambangan, hingga jasa keuangan—sebagai penghalang perdagangan (*trade barriers*). Beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, seperti pada bidang farmasi, pembangkit listrik, ritel, dan waralaba (Puspitawati, 2023; Nurhayati, 2023; USTR, 2025). Tindakan tersebut juga berisiko memicu tindakan balasan/retaliasi, sebuah dilema yang juga dihadapi negara-negara pelaksana ISI.

Kedua, munculnya ketergantungan teknologi. Studi pada sektor perangkat seluler menunjukkan bahwa skema TKDN berbasis inovasi justru menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya penggunaan komponen lokal, yang mengindikasikan ketergantungan pada desain dan teknologi asing (Marzuki & Situmorang, 2024). Demikian pula di sektor energi terbarukan, pengembangan industri panel surya yang patuh pada TKDN sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemilik teknologi asing (Imaduddin, 2024). Hal ini mencerminkan kritik terhadap ISI, di mana industri domestik yang tercipta tetap bergantung pada input teknologi dan barang modal dari negara pusat.

Kekuatan analisis ekonomi politik terletak pada kemampuannya untuk membongkar dialektika antara otonomi negara dan struktur ketergantungan global, dan kasus kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia menjadi salah satu arena ideal untuk mengamatinya (USTR, 2025). Dari perspektif *state-centered*, kebijakan ini adalah manifestasi puncak dari otonomi negara. Dengan melarang ekspor bijih mentah dan mewajibkan pembangunan smelter, negara secara proaktif membentuk keunggulan komparatif, menciptakan lapangan kerja, dan membangun fondasi industri hilir strategis seperti baterai kendaraan listrik. Produk-produk inilah yang kemudian menjadi sasaran utama untuk diserap pasar domestik melalui kebijakan P3DN.

Namun, jika dianalisis dari lensa teori ketergantungan lebih lanjut, kebijakan yang sama juga berpotensi melahirkan bentuk ketergantungan baru yang lebih kompleks. Meskipun nilai ekspor meningkat, proses industrialisasi ini sangat bergantung pada modal dan teknologi asing, terutama dari Tiongkok. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana produk yang dihasilkan benar-benar mendukung semangat kemandirian P3DN jika kapabilitas teknologinya masih dikendalikan pihak luar?

Selain itu, kekalahan Indonesia dalam gugatan WTO melawan Uni Eropa menunjukkan betapa otonomi kebijakan negara pada akhirnya dibatasi oleh tatanan perdagangan global (USTR, 2025).

Dengan demikian, contoh kasus perangkat seluler, panel surya, hingga hilirisasi nikel secara gamblang menunjukkan bahwa upaya "melepaskan diri" dari satu bentuk ketergantungan dapat secara paradoks menciptakan ketergantungan lainnya.

## KESIMPULAN

Analisis kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui dua lensa ekonomi politik mengungkap sebuah dialektika fundamental. Di satu sisi, melalui *state-centered approach*, P3DN adalah manifestasi otonomi negara untuk melindungi industri dan membangun kapasitas nasional. Di sisi lain, dari perspektif Teori Ketergantungan, kebijakan ini dilihat sebagai neo-ISI yang mewarisi risiko kegagalan historis dan berpotensi menciptakan ketergantungan baru yang lebih kompleks pada teknologi, modal, serta akses pasar negara maju. Validitas kekhawatiran ini diperkuat secara empiris oleh temuan literatur yang menunjukkan bahwa implementasi P3DN masih terhambat oleh tantangan internal (kapasitas industri dan SDM) dan tekanan eksternal dari aturan perdagangan global.

Dialektika ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan P3DN tidak dapat diukur semata dari pemenuhan target kuantitatif TKDN, melainkan dari kemampuannya membangun kapabilitas teknologi dan inovasi domestik yang substantif. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar strategi P3DN bergeser dari sekadar pemenuhan angka menjadi penguatan ekosistem inovasi secara fundamental. Langkah ini krusial untuk mengatasi sisi ketergantungan dari dialektika tersebut, sehingga kemandirian industri yang

dicita-citakan tidak bersifat semu dan benar-benar berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abib, A., Triwati, A., & Aryaputra, M. (2017). Peranan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam upaya menstimulusi pertumbuhan investasi di provinsi jawa tengah guna menyongsong globalisasi dunia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 195-206. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.569>
- Azizah, R., Raissa, A., Andika, D., Refinaldi, A., & Atriani, D. (2024). Strategi penanaman modal di indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Inovasi Global Jurnal*, 2(5), 580-591. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i5.92>
- Brambilla, I., Galiani, S., & Porto, G. (2018). Argentine Trade Policies in the XX Century: 60 Years of Solitude. *Latin American Economic Review*, 27(1). <https://doi.org/10.1007/s40503-017-0050-9>
- Collins, R. (1993). Maturation of the State-Centered Theory of Revolution and Ideology. *Sociological Theory* 11, no. 1 (1993): 117-28. <https://doi.org/10.2307/201983>
- Dabukke, F. & Iqbal, M. (2016). Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), 87-101. <https://doi.org/10.21082/akp.v12i2.87-101>
- De Juan, A., & Wegner, E. (2019). Social Inequality, State-centered Grievances, and Protest: Evidence from South Africa. *Journal of Conflict Resolution*, 63(1), 31-58. <https://doi.org/10.1177/0022002717723136>
- Dos Santos, T. (1970). The Structure of Dependence. *The American Economic Review*, 60, 231-236.
- Edet, E.A., & Adie, D.O., (2024). Dependency Theory and Development Policy In A 21st Century Context. *Journal Of Political Discourse*, 2(4). 124-132.
- Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (Eds.). (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge University Press.
- Farid, M., & Luneto, R. (2023). State and Social-Centered Approaches to The Political Economy of South Korea. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 7(2), 554-573. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.8>
- Firdaus, F., Munawar, M., Zakaria, A., Arifin, K., & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1), 318-323. [https://doi.org/10.30738/ed\\_en.v6i1.3330](https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3330)
- Fride, T. & Achraf, M. (2024). Peran industri pertahanan dalam meningkatkan ketahanan nasional (perspektif ekonomi pertahanan). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 11664-11668. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6096>
- Grinberg, N. (2022). From Populism to Neoliberalism: The Political Economy of Latin American Import-Substitution Industrialization: Argentina, Brazil, Mexico and Colombia in Comparative Perspective. *Latin American Perspectives*, 49(2), 183-206. <https://doi.org/10.1177/0094582x211063503>
- Hardenta, A.D., Ariefiti, S.D., & Abyapta, W.R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 114-137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>
- Hidayat, T., Putera, Roni, E., & Koeswara, H., (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 85-94, ISSN 2746-8178, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.203>
- Ibrahim, H. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pendekatan inovasi sosial dan collaborative governance. *Jurnal*

- Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 103.  
<https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1532>
- Imaduddin, M. (2024). Indonesia's First Integrated Solar PV Manufacturer's Strategy to Comply with Local Content Requirements Policy. *2024 International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power (ICTPEP)*, 68-72.  
<https://doi.org/10.1109/ICT-PEP63827.2024.10733367>
- Indrasari, P., Subagja, I., & Hakim, A. (2024). Strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri agro yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(2), 885-899.  
<https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i2.3246>
- Irawan, J.D., (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2508-2520.  
<https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3460>
- Isnaeniah, R.W., Mujiyanto, Lintang, C., Saputro, G.E., Prakoso, L.Y., Murtiana, S., Winarna, A., Sutrasna, Y., Sulistyadi, E., Juliana, Alman, G.C., Yulivan I., & Rianto (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2), 721-730.  
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i2.3819>
- Jackson, E. A. and Jabbie, M. (2020). Import substitution industrialization (ISI): an Approach to Global Economic Sustainability. *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*, 1-12.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-71059-4\\_116-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71059-4_116-1)
- Kanaidi, K (2023). Kajian Implementasi Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Sebagai Aspek Penentu Peningkatan Pemenang Pengadaan Atau Tender Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 123-136.  
<https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.509>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Total Ekspor Impor*. Diakses pada 1 Juni 2025, dari <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-impor>
- Lyne, M. M. (2015). Rethinking the political Economy of Import Substitution Industrialization in Brazil: A Clientelist Model of Development Policymaking. *Latin American Politics and Society*, 57(1), 75-98.  
<https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00257.x>
- Marzuki, Al Araf Assadallah, & Situmorang, Mosgan (2024). Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(2), 159, ISSN 2579-8561, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.159-174>
- Moseley, W.G. (2017). Dependency Theory. In *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology* (eds D. Richardson, N. Castree, M.F. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu and R.A. Marston). <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg1086>
- Moudud, J. & Botchway, K. (2007). Challenging the Orthodoxy: African Development in the Age of Openness. *African and Asian Studies*, 6(4), 457-493.  
<https://doi.org/10.1163/156921007x236981>
- Munson, C. L. and Rosenblatt, M. J. (1997). The impact of local content rules on global sourcing decisions. *Production and Operations Management*, 6(3), 277-290.  
<https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1997.tb00431.x>
- Mutaqin, M.I. (2024). Strategi dan Capaian Indonesia dalam Memberdayakan Konten Lokal di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengadaan. (2024). *Jurnal Media Administrasi*, 9(2), 25-42. <https://doi.org/10.56444/jma.v9i2.1763>
- Nurhayati, M.M. (2023). The Obligation of Local Content Requirements (LCR) of Power Plant

- From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO). *Unram Law Review*, 7(2), ISSN 2549-2365, Universitas Mataram, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298>
- Oatley, T. (2011). The Reductionist Gamble: Open Economy Politics in the Global Economy. *International Organization*, 65(2), 311-341.
- Office of the United States Trade Representative. (2025). 2025 National Trade Estimate report on foreign trade barriers. Executive Office of the President of the United States. <https://ustr.gov>.
- Suryani, E, Nugroho, K.S. & Cadith, Juliannes (2025). E-Purchasing: Langkah Nyata Pemerintah Dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 139–164. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4499>
- Pedah, F., N.A., i., Deksino, G., Simanjuntak, J., Fikri, M., & Wentuk, G. (2025). Implementasi prinsip sustainability (keberlanjutan) untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. *Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 1860-1867. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5125>
- Purwanto, E.D., Harsoyo, & Winarni, A.T. (2021). Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), 56-80. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.472>
- Puspitawati, D.F. (2023). Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2688, ISSN 2656-6753, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5403>
- Sitompul, R. F., Endri, E., Hasibuan, S., Jaqin, C., Indrasari, A., & Putriyana, L. (2022). Policy Challenges of Indonesia's Local Content Requirements on Power Generation and Turbine Production Capability. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.32479/ijeep.12504>
- Zafarullah, H. & Huque, A. S. (2021). Development Policy: Ideas and Practice. Handbook of Development Policy. <https://doi.org/10.4337/9781839100871.00008>